

Ringkasan Provinsi

Laporan Analisis Situasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Tanggamus dan Pesisir Barat, Lampung

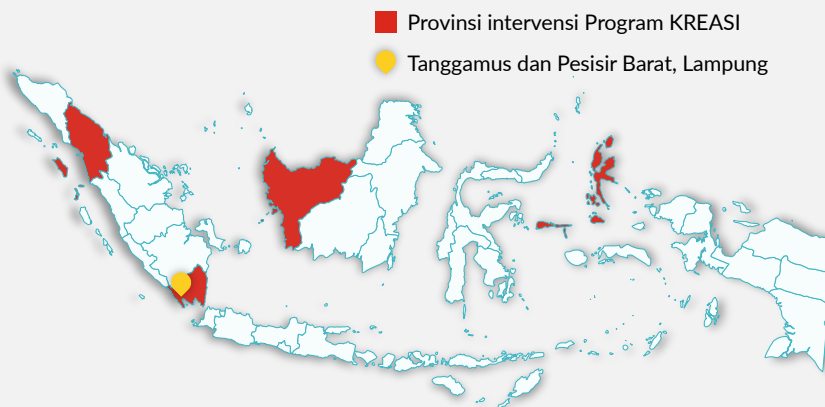
Latar Belakang

Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, pendidikan karakter, serta penerapan inklusi sosial dan pendidikan perubahan iklim di sekolah merupakan langkah penting dalam membentuk masyarakat Indonesia yang cerdas, unggul, dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mentransformasi pendidikan dan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, di mana seluruh pihak—siswa, guru, orang tua, pemangku kepentingan, dan masyarakat—dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan holistik siswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menunjuk Save the Children melalui Program KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia) yang didanai oleh Global Partnership for Education (GPE) Multiplier Grant.

Dalam rangka merancang program yang mampu secara akurat memenuhi kebutuhan lokal, diperlukan diagnosis kontekstual terkait permasalahan di setiap wilayah. KREASI bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk menganalisis situasi keterampilan dasar (numerasi, literasi, dan pembentukan karakter) serta perlindungan anak, termasuk pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dan pendidikan perubahan iklim dengan melakukan lokakarya konsultatif di delapan kabupaten di empat provinsi.

Studi kualitatif ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juli 2024, menghasilkan beragam temuan, mulai dari praktik baik hingga tantangan dalam upaya meningkatkan transformasi pembelajaran yang sejalan dengan tujuan KREASI, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.



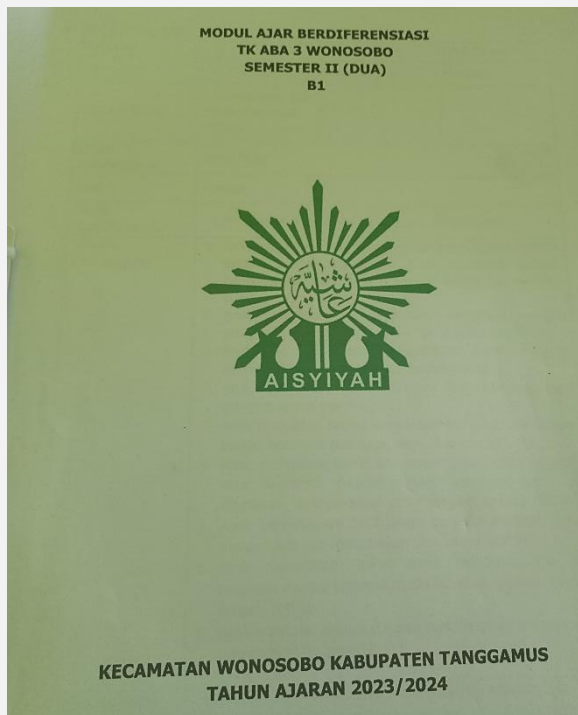
■ Provinsi intervensi Program KREASI

● Tanggamus dan Pesisir Barat, Lampung



Kurikulum & Asesmen

Sebagian besar sekolah di Tanggamus dan Pesisir Barat telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dan cara menghilangkan praktik tes calistung (membaca, menulis, berhitung) dalam proses pendaftaran siswa baru. Meski demikian, Kurikulum Merdeka memberikan kerangka kerja yang memperkuat pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan pendidikan karakter sebagai bagian dari praktik pendidikan yang diharapkan.



Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan numerasi terlihat dalam kebijakan seperti Peraturan Bupati Tanggamus No. 4 Tahun 2020 tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD) dan Peraturan Bupati Pesisir Barat No. 44 Tahun 2016 tentang Gerakan Literasi Sekolah. Kebijakan ini bertujuan menanamkan **budaya literasi dalam ekosistem pendidikan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat** sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Meski demikian, **strategi implementasi untuk memperkuat keterampilan membaca dan numerasi masih perlu dikembangkan**, terutama untuk memastikan pencapaian kompetensi dasar siswa, sebagaimana direkomendasikan dalam rapor pendidikan.

Analisis aspek kurikulum dan asesmen mengungkapkan sejumlah masalah mendasar dalam sistem pendidikan. Pertama, **banyak guru yang belum sepenuhnya memahami tuntutan Kurikulum Merdeka**, sebagian karena kurang optimalnya pemanfaatan platform digital yang

disediakan pemerintah seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan PINTAR. **Keterbatasan akses internet dan rendahnya motivasi untuk menggunakan teknologi menjadi hambatan utama** dalam memahami dan menerapkan kebijakan baru ini. Selain itu, jarak geografis menjadi tantangan besar bagi guru untuk mengikuti pertemuan kelompok kerja guru (KKG), yang mengurangi keterlibatan mereka dalam komunitas belajar profesional.

Di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), **praktik calistung masih dilakukan**, meskipun pemerintah telah menganjurkan sebaliknya. Hal ini sering disebabkan oleh ekspektasi orang tua dan kebijakan asesmen literasi yang diterapkan oleh beberapa sekolah dasar. Praktik ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis komunitas untuk mengedukasi orang tua dan pemangku kepentingan tentang pentingnya pengembangan keterampilan sesuai tahap perkembangan anak.

Pendidikan inklusif dan kesetaraan gender juga menghadapi tantangan. Meski semua sekolah diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus, **banyak guru yang belum memiliki kompetensi untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus tersebut secara efektif dalam proses pembelajaran.** Hal ini menggarisbawahi kebutuhan akan pelatihan yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas guru dalam mendukung inklusi sosial dan kesetaraan gender di kelas.

Dalam konteks perubahan iklim, guru menyadari perubahan pola musim dan semakin panjangnya musim kemarau, tetapi **guru belum tahu bagaimana mengintegrasikan isu ini ke dalam pembelajaran.** Hal ini

menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dan program pelatihan bagi guru untuk membangun kesadaran siswa terhadap isu perubahan iklim.

Universitas dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Provinsi Lampung, seperti Universitas Negeri Lampung dan UIN Raden Intan, **memiliki potensi besar sebagai mitra untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah ini**. Kolaborasi dengan LPTK dapat mencakup pendidikan prajabatan untuk calon guru, penelitian, dan program pengabdian kepada masyarakat, yang semuanya dapat memperkuat ekosistem pendidikan di Tanggamus dan Pesisir Barat.

Praktik Pengajaran

Guru di Tanggamus dan Pesisir Barat memprioritaskan peningkatan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter siswa. Hal ini tercermin dalam **suasana kelas yang mulai kondusif dengan adanya dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru, sebagaimana ditunjukkan dalam rapor pendidikan**. Namun, tantangan besar seperti kurangnya pelatihan profesional dan keterbatasan sumber daya pembelajaran menghambat efektivitas praktik pembelajaran.

Aspek praktik pembelajaran menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas pengajaran dengan pengarusutamaan GEDSI dan pendidikan perubahan iklim. Saat ini, **guru belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran**, terutama karena **kurangnya pemahaman tentang strategi mengajar yang inklusif**. Pendidikan perubahan iklim juga belum **terintegrasi secara menyeluruh** dalam kurikulum dan pembelajaran. Sebagian besar respons terhadap isu ini terbatas pada sekolah Adiwiyata, sementara guru umumnya memiliki keterbatasan ide dan sumber daya untuk mengimplementasikan pendidikan perubahan iklim.

Dalam hal akses ke platform digital yang mendukung pengembangan profesional guru, seperti PMM dan PINTAR, **banyak guru yang masih belum familiar dengan penggunaannya**. Hal ini mengurangi efektivitas mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya pembelajaran yang beragam. Selain itu, sekolah-sekolah di wilayah ini memiliki fasilitas dan program literasi yang terbatas. **Banyak sekolah tidak memiliki ruang perpustakaan, pojok baca, atau buku bacaan yang memadai** untuk mendukung literasi dan numerasi siswa. Platform seperti SIBI dan PMM, yang sebenarnya dapat membantu pembelajaran literasi dan numerasi, juga jarang digunakan.

Kebijakan Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran kolaboratif, **tetapi kurangnya kerja sama antara guru menjadi hambatan signifikan dalam berbagi ide dan sumber daya pembelajaran**. Jarak geografis antar sekolah juga **memperumit kolaborasi**, baik melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun kerja sama antar sekolah. Selain itu, kurangnya fasilitas untuk mendukung pembelajaran berbasis literasi dan numerasi semakin memperburuk tantangan dalam praktik mengajar.

"Bergerak Bersama Menuju Sekolah Cerdas"	
MERDEKA BELAJAR	
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA SD	
INFORMASI UMUM	
A. IDENTITAS MODUL	
Penyusun	: EVI TRIJAYANTI, S.Pd
Instansi	: SD NEGERI KALIREJO
Tahun Penyusunan	: Tahun 2023
Jenjang Sekolah	: SD
Mata Pelajaran	: Bahasa Indonesia
Fase / Kelas	: A / 1
Bab 4	: Aku Bisa!
Tema	: Bermain dan Bergerak
Alokasi Waktu	: 6 Minggu
B. KOMPETENSI AWAL	
C. PROFIL PELAJAR PANCASILA	
D. SARANA DAN PRASARANA	
E. TARGET PESERTA DIDIK	
F. JUMLAH PESERTA DIDIK	
G. MODEL PEMBELAJARAN	
KOMPONEN INTI	
A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN	

Untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran, **guru memerlukan dukungan berupa pelatihan berkelanjutan, akses yang lebih baik ke sumber daya pembelajaran, serta penguatan kerja sama antar guru.** Dengan mengintegrasikan perspektif GEDSI dan pendidikan perubahan iklim ke dalam pelatihan dan sumber daya, guru dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap tantangan global.

Kepemimpinan Pendidikan

Kepala sekolah di Tanggamus dan Pesisir Barat telah menunjukkan berbagai praktik baik dalam mendukung pengembangan kurikulum, pengembangan profesional guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman secara fisik dan psikologis. Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan dan pemantauan kurikulum, dengan memasukkan elemen pendidikan inklusif dan perubahan iklim ke dalam kebijakan serta program sekolah. Mereka juga fokus pada pengembangan profesional guru dengan menetapkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah berupaya memastikan keselamatan siswa dan menjamin akses yang setara bagi semua siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam hal menghadirkan pendidikan yang lebih setara, kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong partisipasi aktif siswi di bidang Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) juga patut diapresiasi. Kebijakan dan program yang mempromosikan kepemimpinan siswi, pelatihan kepemimpinan, proyek sosial, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan kolaborasi, kejujuran, dan empati telah mulai diterapkan. Namun, implementasi program ini masih memerlukan penguatan agar dampaknya lebih merata di semua sekolah.



Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan dalam kepemimpinan pendidikan yang perlu diatasi. **Banyak kepala sekolah belum memanfaatkan data dari rapor pendidikan (Rapor Pendidikan)** untuk pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran. Penggunaan data yang lebih strategis dapat membantu sekolah mengembangkan program yang lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa.

Kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) juga masih membutuhkan peningkatan. Program kesejahteraan siswa, seperti pembelajaran sosial emosional dan disiplin positif, belum diimplementasikan secara optimal di semua sekolah. Hal ini menghambat pengembangan keterampilan kepemimpinan dan partisipasi aktif siswa, serta pencapaian tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, mekanisme yang jelas untuk memantau aktivitas pembelajaran dan kemajuan siswa masih belum ada di banyak sekolah.

Dalam hal implementasi program terkait GEDSI dan perubahan iklim, upaya kepala sekolah masih belum memadai. Pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, kesetaraan gender, dan kesadaran lingkungan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan dan praktik sekolah. Dukungan dalam

bentuk pelatihan khusus bagi kepala sekolah sangat diperlukan agar mereka lebih mampu mengintegrasikan GEDSI dan pendidikan perubahan iklim dalam rencana sekolah.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa strategi yang saat ini digunakan untuk meningkatkan literasi dan numerasi belum memberikan hasil yang diharapkan. **Kepala sekolah memerlukan dukungan untuk memahami rapor pendidikan dan menggunakannya** sebagai alat untuk mengembangkan strategi yang tepat guna dalam meningkatkan keterampilan dasar siswa.

Perlindungan Anak

Sekolah-sekolah di Tanggamus dan Pesisir Barat telah mengadakan sesi kesadaran dan pelatihan terkait perlindungan anak. Guru menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif untuk mengedukasi siswa tentang bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. **Namun, kebijakan internal sekolah yang mengikat terkait isu-isu tersebut masih kurang diterapkan.** Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan perlindungan anak yang lebih tegas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak.

Selain itu, **layanan administratif untuk anak di sekolah belum beroperasi secara optimal.** Efisiensi dan efektivitas layanan perlu ditingkatkan agar kesejahteraan dan perlindungan anak benar-benar terjamin. Sebagai bagian dari upaya ini, penting untuk mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih kuat untuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak berjalan dengan baik.

Kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana dan wabah penyakit juga menjadi perhatian serius. Banyak sekolah di kedua kabupaten telah terdampak banjir berkali-kali, tetapi kapasitas mereka untuk mengelola bencana masih sangat terbatas. Langkah-langkah mitigasi bencana seperti kolaborasi dengan komunitas lokal dan pelatihan tanggap darurat perlu diperkuat untuk memastikan keselamatan siswa dalam situasi darurat. Selain itu, integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum dapat membantu meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka.

Pemerintah daerah Tanggamus dan Pesisir Barat menunjukkan komitmen terhadap penyediaan pendidikan dan perlindungan anak melalui kebijakan yang mendukung siswa berkebutuhan khusus dan siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Kebijakan ini mencakup kualifikasi guru, kurikulum, perlindungan anak, dan aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun, Tanggamus sudah lebih dahulu mengatur pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah, sementara Pesisir Barat membutuhkan dukungan khusus.

Untuk memperkuat perlindungan anak, kedua kabupaten perlu mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik dan terintegrasi terkait bullying, kekerasan seksual, intoleransi, serta kesiapsiagaan bencana. Dengan mengedepankan prinsip GEDSI, perlindungan anak dapat menjadi lebih inklusif, mencakup semua siswa tanpa memandang latar belakang, dan memastikan keamanan mereka baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.



Kurikulum dan Asesmen:

1. **Menyediakan pengembangan profesional bagi pemangku kepentingan pendidikan tentang Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka**, termasuk pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan program dan pemantauan implementasi.
2. **Memberikan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah**, termasuk mendukung guru di daerah terpencil untuk menggunakan “Awan Penggerak”.
3. **Menyediakan pelatihan profesional untuk pemangku kepentingan utama tentang pembelajaran terdiferensiasi, pendidikan inklusif, dan pendidikan perubahan iklim** untuk meningkatkan implementasi yang efektif.
4. **Mendukung pemerintah daerah dan legislatif untuk mengembangkan regulasi terkait implementasi pendidikan.**
5. **Membangun kemitraan dengan aktivis literasi dan universitas** untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang memperkuat keterampilan dasar siswa. Kerja sama ini dapat mencakup pengabdian masyarakat, penelitian, dan program Kampus Merdeka.

Praktik Pengajaran:

1. **Menyediakan pengembangan profesional bagi guru terkait Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka**, termasuk penerapan pembelajaran terdiferensiasi, penggunaan PMM, serta integrasi kesetaraan gender dan pendidikan inklusif.
2. **Mendorong penggunaan “Awan Penggerak” bagi guru yang memiliki kendala akses internet**, serta memperkuat supervisi oleh pengawas dan kepala sekolah dalam memanfaatkan PMM.
3. **Memperkuat pengembangan profesional guru melalui komunitas belajar (KKG), PMM, dan program lain yang relevan**, termasuk pelatihan tentang pendidikan inklusif dan perspektif kesetaraan gender.
4. **Mengembangkan materi pembelajaran terkait perubahan iklim yang sesuai dengan tingkat pendidikan** dan menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai untuk pendidikan perubahan iklim.

Kepemimpinan Pendidikan:

1. **Memfasilitasi Bappeda untuk memimpin refleksi program pendidikan bersama pemangku kepentingan** dan mengembangkan perencanaan berbasis data yang sesuai dengan kondisi lokal.
2. **Menyediakan pelatihan profesional untuk pemerintah dan kepala sekolah** dalam berbagai aspek kepemimpinan, termasuk pendidikan inklusif dan kesetaraan gender.
3. **Membangun budaya kolaborasi dan komunikasi terbuka antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua.**
4. **Menyediakan infrastruktur dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus** serta membangun jaringan sekolah dalam melayani anak berkebutuhan khusus.

Perlindungan Anak:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak kepada seluruh pemangku kepentingan serta mengembangkan SOP manajemen kasus yang didukung oleh kinerja optimal TPPK.
2. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, LSM, dan komite sekolah dalam perlindungan anak, serta menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk pembentukan dan penguatan TPPK.
3. Meningkatkan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana melalui pelatihan tanggap darurat dan kerja sama dengan komunitas lokal, termasuk integrasi pendidikan perubahan iklim untuk membangun kesadaran siswa terhadap risiko lingkungan.

